



LEMBARAN KALURAHAN BALONG

KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 8

TAHUN 2025

PERATURAN KALURAHAN BALONG  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
KALURAHAN BALONG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Balong Nomor 4 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Girisubo Nomor ... tahun 2025 ;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
  - d.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan dan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 Tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 20021-2026 );
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ruang Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

24. Surat edaran Bupati nomor 48 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2025.
25. Peraturan Kalurahan Balong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balong Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Balong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Balong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Balong Tahun 2017 Nomor 3);
27. Peraturan Kalurahan Balong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan Kalurahan Balong Nomor 4 Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Balong Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Kalurahan Balong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Balong Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BALONG  
dan  
LURAH BALONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 rincian sebagai berikut :

|    |                                |     |                      |
|----|--------------------------------|-----|----------------------|
| 1  | Pendapatan Desa                | :   | Rp. 2.006.190.694,00 |
| 2  | Belanja Desa                   | :   | Rp. 2.721.060.653,00 |
|    | Surplus/Defisit                | Rp. | (714.869.959),00     |
| 3  | Pembiayaan Desa                |     |                      |
| a. | Penerimaan                     | :   | Rp. 1.169.519.959,00 |
| b. | Pengeluaran                    | :   | Rp. 454.650.000,00   |
|    | Selisih Pembiayaan (a - b)     | :   | Rp 714.869.959,00    |
|    | SILPA Tahun Anggaran Berkenaan | :   | Rp 0,00              |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKalurahan;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### **Pasal 4**

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal;

**Pasal 7**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Balong

Pada tanggal 30 Desember 2025



LURAH BALONG,

SUMARJO

Diundangkan di Balong

Pada tanggal 30 Desember 2025

CARIK BALONG,



PURWANTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN (Rp)           | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 15.000.000,00           |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 1.979.190.694,00        |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain                  | 12.000.000,00           |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>2.006.190.694,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 803.507.842,16          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 1.318.617.975,24        |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 531.974.683,00          |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 66.960.152,60           |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>2.721.060.653,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>(714.869.959,00)</b> |            |
| 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan                 | 1.169.519.959,00        |            |
| 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya                | 1.169.519.959,00        |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan                | 454.650.000,00          |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa                 | 181.650.000,00          |            |
| 6.2.9.   | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya        | 273.000.000,00          |            |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>               | <b>714.869.959,00</b>   |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

BALONG, 30 December 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING |           | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                  | SUMBERDANA       |
|---------------|-----------|--|--------------------------------|------------------|
| 1             | 2         | 3  | 4                              | 5                |
|               | <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN</b>  |                                |                  |
|               | 4.1.      | Pendapatan Asli Desa   | 15.000.000,00                  |                  |
|               | 4.2.      | Pendapatan Transfer  | 1.979.190.694,00               |                  |
|               | 4.3.      | Pendapatan Lain-lain   | 12.000.000,00                  |                  |
|               |           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   | <b>2.006.190.694,00</b>        |                  |
|               | <b>5.</b> | <b>BELANJA</b>   |                                |                  |
| <b>1</b>      |           | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                              | <b><u>1.872.827.864,00</u></b> |                  |
| 1.1.          |           | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa        | 955.545.078,00                 |                  |
| 1.1.01        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                             | 47.810.000,00                  | ADD, PAD         |
| 1.1.01        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 47.810.000,00                  |                  |
| 1.1.02        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                          | 630.499.100,00                 | ADD, PAD         |
| 1.1.02        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 630.499.100,00                 |                  |
| 1.1.03        |           | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                      | 43.610.962,16                  | ADD              |
| 1.1.03        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 43.610.962,16                  |                  |
| 1.1.04        |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)             | 110.422.715,84                 | ADD, DLL, PBH, F |
| 1.1.04        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 110.422.715,84                 |                  |
| 1.1.05        |           | Penyediaan Tunjangan BPD   | 61.947.780,00                  | ADD, PAD         |
| 1.1.05        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 61.947.780,00                  |                  |
| 1.1.06        |           | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 9.660.000,00                   | ADD, PBH         |
| 1.1.06        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 9.660.000,00                   |                  |
| 1.1.07        |           | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  | 37.319.520,00                  | ADD, PBH         |
| 1.1.07        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 37.319.520,00                  |                  |
| 1.1.08        |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa               | 14.275.000,00                  | DDS              |
| 1.1.08        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 14.275.000,00                  |                  |
| 1.2.          |           | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                                      | 99.458.848,00                  |                  |
| 1.2.02        |           | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa  | 31.928.956,00                  | DLL              |
| 1.2.02        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 31.928.956,00                  |                  |
| 1.2.03        |           | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)              | 27.349.892,00                  | DLL              |
| 1.2.03        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 600.000,00                     |                  |
| 1.2.03        | 5.3.      | Belanja Modal  | 26.749.892,00                  |                  |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)        | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|----------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                    | 5          |
| 1.2.90        |      | Pengadaan Peralatan Kerja   | 35.600.000,00        | ADD, DLL   |
| 1.2.90        | 5.3. | Belanja Modal   | 35.600.000,00        |            |
| 1.2.94        |      | Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional                                   | 2.700.000,00         | PBH        |
| 1.2.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.700.000,00         |            |
| 1.2.95        |      | Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja                                       | 1.880.000,00         | PBH        |
| 1.2.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.880.000,00         |            |
| <b>1.3.</b>   |      | <b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b> | <b>16.847.040,00</b> |            |
| 1.3.01        |      | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan  | 10.707.500,00        | PBP        |
| 1.3.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.707.500,00         |            |
| 1.3.01        | 5.3. | Belanja Modal   | 8.000.000,00         |            |
| 1.3.02        |      | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)                                 | 2.210.000,00         | PBH, PBP   |
| 1.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.210.000,00         |            |
| 1.3.90        |      | Penyusunan Monografi Desa   | 2.577.500,00         | PAD        |
| 1.3.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.577.500,00         |            |
| 1.3.91        |      | Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin  | 1.352.040,00         | PBH        |
| 1.3.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.352.040,00         |            |
| <b>1.4.</b>   |      | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>     | <b>95.022.400,00</b> |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                 | 2.750.000,00         | PBH        |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.750.000,00         |            |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                              | 2.755.000,00         | PBH        |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.755.000,00         |            |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)                    | 4.300.000,00         | PBH        |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.300.000,00         |            |
| 1.4.05        |      | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa                            | 15.222.500,00        | PBH        |
| 1.4.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.622.500,00         |            |
| 1.4.05        | 5.3. | Belanja Modal   | 9.600.000,00         |            |
| 1.4.06        |      | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)                 | 1.457.500,00         | PAD        |
| 1.4.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.457.500,00         |            |
| 1.4.07        |      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                 | 1.175.000,00         | PBH        |
| 1.4.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.175.000,00         |            |
| 1.4.08        |      | Pengembangan Sistem Informasi Desa  | 7.575.000,00         | DDS        |
| 1.4.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 7.575.000,00         |            |
| 1.4.90        |      | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran                                  | 3.432.400,00         | PBH        |
| 1.4.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 3.432.400,00         |            |
| 1.4.91        |      | Pengisian Perangkat Desa  | 19.215.000,00        | ADD, PBH   |
| 1.4.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 19.215.000,00        |            |
| 1.4.92        |      | Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa                                 | 19.640.000,00        | PBH        |
| 1.4.92        | 5.1. | Belanja Pegawai   | 19.640.000,00        |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                            | 5          |
| 1.4.93        |      | Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa   | 17.500.000,00                | PBH        |
| 1.4.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 17.500.000,00                |            |
| 1.5.          |      | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>   | <b>705.954.498,00</b>        |            |
| 1.5.06        |      | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  | 5.365.000,00                 | PAD        |
| 1.5.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 5.365.000,00                 |            |
| 1.5.90        |      | Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa   | 700.589.498,00               | DLL        |
| 1.5.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 700.589.498,00               |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>  | <b><u>312.216.500,40</u></b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>   | <b>11.300.000,00</b>         |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)      | 11.300.000,00                | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 11.300.000,00                |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>  | <b>124.460.905,60</b>        |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inseentif)                  | 67.810.000,00                | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 67.810.000,00                |            |
| 2.2.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 7.282.000,00                 | PBP        |
| 2.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 7.282.000,00                 |            |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan   | 7.748.905,60                 | DDS        |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 7.748.905,60                 |            |
| 2.2.91        |      | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)  | 1.300.000,00                 | DDS        |
| 2.2.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 1.300.000,00                 |            |
| 2.2.94        |      | Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD   | 2.520.000,00                 | DDS        |
| 2.2.94        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 2.520.000,00                 |            |
| 2.2.98        |      | Insentif kader kesehatan/KB  | 37.800.000,00                | DDS        |
| 2.2.98        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 37.800.000,00                |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>  | <b>59.575.889,80</b>         |            |
| 2.3.10        |      | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                                | 59.575.889,80                | DDS        |
| 2.3.10        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 1.245.639,80                 |            |
| 2.3.10        | 5.3. | Belanja Modal  | 58.330.250,00                |            |
| 2.4.          |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>  | <b>98.125.000,00</b>         |            |
| 2.4.91        |      | Pemberian stimulan jamban sehat  | 98.125.000,00                | DDS, PBP   |
| 2.4.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 98.125.000,00                |            |
| 2.5.          |      | <b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>   | <b>10.867.405,00</b>         |            |
| 2.5.92        |      | Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa   | 10.867.405,00                | PBH, PBP   |
| 2.5.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 10.867.405,00                |            |
| 2.8.          |      | <b>Sub Bidang Pariwisata</b>   | <b>7.887.300,00</b>          |            |
| 2.8.90        |      | Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata   | 4.424.900,00                 | DLL        |
| 2.8.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 4.424.900,00                 |            |
| 2.8.91        |      | Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa  | 3.462.400,00                 | DLL        |
| 2.8.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 3.462.400,00                 |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                            | 5          |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>   | <b><u>398.152.596,00</u></b> |            |
| <b>3.1.</b>   |      | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                     | <b>173.777.019,00</b>        |            |
| 3.1.92        |      | Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana                                      | 173.777.019,00               | DLL        |
| 3.1.92        | 5.3. | Belanja Modal   | 173.777.019,00               |            |
| <b>3.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>  | <b>25.825.500,00</b>         |            |
| 3.2.01        |      | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa  | 4.235.500,00                 | PBP        |
| 3.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.235.500,00                 |            |
| 3.2.03        |      | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll) | 10.600.000,00                | DDS, PBH   |
| 3.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 10.600.000,00                |            |
| 3.2.04        |      | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa                   | 10.990.000,00                | PBH        |
| 3.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 10.990.000,00                |            |
| <b>3.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>   | <b>182.650.077,00</b>        |            |
| 3.3.05        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa      | 96.732.199,00                | DDS, DLL   |
| 3.3.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.499.000,00                 |            |
| 3.3.05        | 5.3. | Belanja Modal   | 94.233.199,00                |            |
| 3.3.93        |      | Operasional Karang Taruna   | 3.045.000,00                 | PBH        |
| 3.3.93        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 3.045.000,00                 |            |
| 3.3.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga   | 82.872.878,00                | DDS        |
| 3.3.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.950.500,00                 |            |
| 3.3.99        | 5.3. | Belanja Modal   | 80.922.378,00                |            |
| <b>3.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>  | <b>15.900.000,00</b>         |            |
| 3.4.03        |      | Pembinaan PKK   | 5.000.000,00                 | PBH        |
| 3.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.000.000,00                 |            |
| 3.4.92        |      | Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)                    | 4.180.000,00                 | PBH        |
| 3.4.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.180.000,00                 |            |
| 3.4.95        |      | Operasional LPMD dan/atau LPMP  | 2.350.000,00                 | PBH        |
| 3.4.95        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.350.000,00                 |            |
| 3.4.96        |      | Operasional PKK   | 4.370.000,00                 | PBH        |
| 3.4.96        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.370.000,00                 |            |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>  | <b><u>70.903.540,00</u></b>  |            |
| <b>4.1.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>  | <b>5.000.000,00</b>          |            |
| 4.1.05        |      | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)   | 5.000.000,00                 | PAD        |
| 4.1.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.000.000,00                 |            |
| <b>4.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>  | <b>57.803.540,00</b>         |            |
| 4.2.01        |      | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)                    | 46.336.945,00                | DDS        |
| 4.2.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.575.000,00                 |            |
| 4.2.01        | 5.3. | Belanja Modal   | 44.761.945,00                |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                       | 5          |
| 4.2.92        |      | Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan                     | 5.356.000,00            | DDS        |
| 4.2.92        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.356.000,00            |            |
| 4.2.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan            | 6.110.595,00            | DDS        |
| 4.2.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 6.110.595,00            |            |
| 4.3.          |      | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                    | 8.100.000,00            |            |
| 4.3.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 8.100.000,00            | PBH, PBP   |
| 4.3.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 8.100.000,00            |            |
| <b>5</b>      |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>     | <b>66.960.152,60</b>    |            |
| 5.1.          |      | Sub Bidang Penanggulangan Bencana                                 | 1.160.152,60            |            |
| 5.1.00        |      | Kegiatan Penanggulangan Bencana                                   | 1.160.152,60            | DDS        |
| 5.1.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga   | 1.160.152,60            |            |
| 5.2.          |      | Sub Bidang Keadaan Darurat  | 1.000.000,00            |            |
| 5.2.00        |      | Penanganan Keadaan Darurat  | 1.000.000,00            | DDS        |
| 5.2.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga   | 1.000.000,00            |            |
| 5.3.          |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak                                       | 64.800.000,00           |            |
| 5.3.00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                       | 64.800.000,00           | DDS        |
| 5.3.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga   | 64.800.000,00           |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>   | <b>2.721.060.653,00</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>  | <b>(714.869.959,00)</b> |            |
| <b>6.</b>     |      | <b>PEMBIAYAAN</b>   |                         |            |
| 6.1.          |      | Penerimaan Pembiayaan   | 1.169.519.959,00        |            |
| 6.2.          |      | Pengeluaran Pembiayaan  | 454.650.000,00          |            |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>   | <b>714.869.959,00</b>   |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                             | <b>0,00</b>             |            |

BALONG, 30 December 2025

